

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT
DAN TOKO SWALAYAN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN
TENAGA KERJA DI KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN
MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Muthia Atiqah

NPP. 30.0896

Asdaf Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: muthia542@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Andi Masrich, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Mempawah Regency is a district in West Kalimantan Province, Mempawah Regency is one of the districts that produces a lot of economic actors. Based on Regional Regulation Number 6 of 2015 concerning Implementation of Policies for Structuring and Fostering People's Markets and Supermarkets. The people's market is a community economic driver that has a strategic function and has close ties to the social and cultural aspects of society.*

Purpose: *This study aims to analyze how the Regional Regulation of Mempawah Regency Number 6 of 2015 concerning Implementation of Policies for the Arrangement and Development of People's Markets and Supermarkets has succeeded in having a positive impact on Mempawah Regency.* **Method:** *This study uses a descriptive method through an inductive approach with a qualitative research approach. Qualitative research emphasizes exploration and discovery and does not intend to test theory.* **Result:** *In addition, this research provides an overview and development of Mempawah Regency so that future evaluations can be carried out for the better.* **Conclusion:** *The results of this study indicate that the implementation of people's markets needs to be held accountable to avoid things that can trigger conflict in the area. In this thesis will be discussed about it.*

Keywords: *Implementation, People's Market, Supermarkets*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Mempawah ialah kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah merupakan salah satu kabupaten yang banyak menghasilkan pelaku ekonomi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan. Pasar rakyat merupakan penggerak ekonomi masyarakat yang memiliki fungsi strategis dan memiliki kedekatan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan berhasil memberikan dampak yang positif bagi Kabupaten

Mempawah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengutamakan eksplorasi dan penemuan yang tidak bermaksud untuk menguji teori. **Hasil/Temuan:** Selain itu, dengan adanya penelitian ini memberikan gambaran serta perkembangan dari Kabupaten Mempawah agar dapat dilakukan evaluasi kedepannya menjadi lebih baik. **Kesimpulan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap implementasi pasar rakyat perlu dilakukan pertanggung jawaban untuk menghindari hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik di daerah tersebut. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai hal tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Pasar Rakyat, Toko Swalayan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era dewasa saat ini, pemerintah Indonesia terjadi banyak perubahan dan pembangunan dalam segala bidang, dimana pada satu sisi memperlihatkan manfaat pada sebagian masyarakat. Namun di sisi lain memberikan dampak yang kurang menguntungkan, misalnya keberadaan pasar rakyat cenderung terasingkan. Keberadaan pasar rakyat di era ini terdesak dengan adanya toko swalayan yang terus berkembang pesat. Pasar merupakan suatu tempat proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang dan jasa. Penyelenggaraan perdagangan terutama pasar rakyat dan toko swalayan bisa berkembang jika implementasi kebijakannya sesuai dengan harapan masyarakat. Kebijakan ini dimaksudkan agar penyelenggaraan perdagangan dapat dilaksanakan dengan tatanan yang teratur, tertib, terkoordinir dan memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat.

Peran pemerintah adalah sebagai pembentuk kebijakan, kebijakan itu sendiri merupakan aturan pemerintah yang harus dilaksanakan atau diikuti oleh siapapun tanpa terkecuali. Kebijakan dalam bentuk Undang- Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Di dalam suatu kebijakan ini diperlukan adanya implementasi atau tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pemerintah maupun swasta yang sudah diarahkan pada peencapaian tujuan sasaran yang di tetapkan. Implementasi kebijakan juga disebut sebagai proses dari keputusan kebijakan yang telah di buat oleh lembaga pemerintah dan diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat ikut patuh terhadap suatu kebijakan yang telah dibuat. Arus perdagangan pada pasar rakyat dan toko swalayan ini perlu dikelola dengan baik, agar berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat bisa terpenuhi dengan mudah, dan dapat ditemui pada setiap daerah setiap tempat dan disemua lingkungan masyarakat. Disinilah perlunya pengaturan distribusi perdagangan yang secara umum untuk menjaga stabilisasi harga dan stabilisasi pendistribusian barang terutama barang pokok dan barang penting lainnya.

Keberadaan pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat pertokoan, toko swalayan sampai pada toko eceran dan toko kelontong merupakan mata rantai dalam pendistribusian kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya sampai ke pelosok daerah. Pemerintah menjamin kelancaran distribusi perdagangan sehingga keberadaan pertokoan ini menjadi mitra kerja pemerintah didalam memenuhi kebutuhan ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya untuk masyarakat. Kewajiban pemerintah tidak hanya melindungi masyarakat sebagai

konsumen, namun juga harus bisa memberikan kondisi yang kondusif bagi pengembangan usaha masyarakat, terutama kepada pasar rakyat yang rentan terhadap persaingan dari perusahaan besar dan perusahaan luar daerah. Dalam penelitian ini akan fokus pada penataan dan pembinaan pasar rakyat yang dimiliki oleh UKM-M dan toko swalayan.

Banyak jumlah pasar rakyat dan toko swalayan dengan jarak yang berdekatan dengan jumlah yang banyak menyebabkan terjadinya persaingan intens dalam UMK-M untuk memperebutkan minat konsumen dalam berbelanja kebutuhan barang dan jasa sehari-hari. Fenomena yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, yaitu hadirnya toko swalayan dengan kategori minimarket sudah sangat familiar dikenal masyarakat, dan keberadaannya bisa berada ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga minimarket-minimarket ini menjadi alternatif pilihan utama untuk berbelanja. Apalagi dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh masing-masing minimarket membuat konsumen semakin nyaman untuk menentukan pilihan belanja pada minimarket terdekat. Keberadaan minimarket terutama minimarket yang merupakan gerai/outlet dari perusahaan besar terus berkembang di tengah-tengah permukiman masyarakat dilingkungan pasar rakyat dengan toko-toko eceran atau toko kelontong kecil yang hanya dikelola secara mandiri atau UMK-M. Sehingga masuknya toko swalayan dengan kekuatan besar berimbas langsung terhadap kelangsungan pasar rakyat tersebut.

Dengan hadirnya toko swalayan ini menyebabkan konsumen yang awalnya berbelanja di pasar rakyat sekarang berubah haluan dan memilih berbelanja di toko swalayan tersebut. Berkurangnya konsumen yang berbelanja di pasar rakyat menyebabkan permintaan akan barang di pasar tersebut menurun, sehingga pendapatannya juga ikut menurun. Hal ini tentu sangat sulit bagi para pedagang di pasar rakyat untuk memaksimalkan keuntungan dan UMK-M sulit untuk mengembangkan usahanya. Pasar rakyat merupakan pasar yang memiliki peran penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya di Kabupaten Mempawah. Keberadaan pasar rakyat ini sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tetapi pasar ini juga membantu masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan kegiatan berdagang, karena di dalam pasar rakyat terdapat banyak aktor yang mendukung demi perkembangan di era globalisasi yang memiliki arti penting dan berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli dan sebagainya.

Perkembangan globalisasi saat ini dinilai telah membawa banyak perubahan, terutama perubahan yang terjadi pada pola kehidupan dan kebutuhan masyarakat dengan munculnya berbagai fasilitas perbelanjaan yang sudah menyatu dan memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan hanya sekedar tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi pasar juga wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional, pasar rakyat itu sendiri merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Diketahui jumlah pasar rakyat dan toko swalayan di Kecamatan Mempawah Hilir tidak seimbang sehingga mengakibatkan menurunnya eksistensi pada pasar rakyat, dalam jangka panjang pasar rakyat akan mengalami persaingan usaha yang ketat dan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak seimbang sehingga menyebabkan pasar rakyat menjadi terasingkan. Kebijakan tentang Penataan Pasar Rakyat di

Kecamatan Mempawah Hilir telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan. Kebijakan ini akan berhasil sesuai dengan tujuannya apabila implementasi berjalan dengan lancar. Dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan di Kecamatan Mempawah Hilir tidak terlepas adanya hambatan yang ditemui oleh peneliti karena proses implementasi bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan di lapangan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Diah Sri Laksmi Dewi, Ni Luh Made Mahendrawati dan Desak Gde Dwi Arini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keberadaan toko modern yang ada di Kota Denpasar menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau tidak. Penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat dan toko swalayan yang telah dibuat oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah sehingga adanya keadilan antara pasar rakyat dan toko swalayan. Persamaannya penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Diah Sri Laksmi Dewi, Ni Luh Made Mahendrawati dan Desak Gde Dwi Arini dengan penelitian ini adalah sama-sama mengenai implementasi kebijakan.

Penelitian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Sartika Putriana Dewi bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan serta hambatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus terhadap hambatan dari implementasi kebijakan tetapi juga menjelaskan upaya untuk mengatasinya. Penelitian Ayu Sartika Putriana Dewi memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti Implementasi Kebijakan, namun yang membedakannya adalah objek penelitiannya, serta persamaan lainnya penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Willya Monica Tanyhana bertujuan untuk mengetahui karakteristik, permasalahan dan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Pasar Cikutra. Sedangkan penelitian ini berfokus untuk mengatur bagaimana agar pasar rakyat dan toko swalayan mendapatkan penataan dan pembinaan yang setara atau adil yang tidak merugikan pasar rakyat atau UMK-M. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti Implementasi Kebijakan tetapi dengan lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian keempat, penelitian ini dilakukan oleh Teza Haryana dengan tujuan untuk mengetahui standards and objectives, resources, characteristics of the implementing agencies, interorganizational communication and enforcement activities, economic social and political conditions pada kebijakan tentang penataan pasar rakyat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang. Sedangkan penelitian ini untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan yang dijalankan sudah sesuai tujuan yang diinginkan yaitu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan berkembangnya toko swalayan di era globalisasi ini. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu kedua penelitian ini sama-sama meneliti dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Yulian Rizqi Gigih bertujuan untuk mengetahui penataan toko modern dan pasar tradisional dalam rangka mewujudkan keseimbangan pertumbuhan pasar. Dan untuk mengetahui

kendala yang dialami oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penataan toko modern dan pasar tradisional. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini hanya terletak di lokasi fokusnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan penelitian dahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni membahas secara spesifik implementasi kebijakan seleksi terbuka dan penggunaan sistem merit saat pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan, serta hambatan-hambatan yang dialami dalam implementasi kebijakan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fauziah Ridwan, Mia Rosmiati, Asep Sumaryana, AD. Saefullah, Ahmad Buchari, David Ariswandy, Bovie Kawulusan, dan Rafian Juni lebih cenderung membahas mekanisme pelaksanaannya serta seberapa efektivitasnya pelaksanaan seleksi terbuka. Penelitian ini menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Teori Edwards III (1980) dengan empat dimensi yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Peneliti melakukan penelitian yang sama dengan beberapa penelitian sebelumnya, namun penelitian ini dilakukan secara spesifik dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni membahas implementasi kebijakan dan penataan pasar rakyat dan toko swalayan oleh dinas perindustrian, perdagangan dan tenaga kerja. Penelitian ini sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan beberapa penelitian tersebut, namun beberapa yang membedakannya yaitu seperti objek penelitian, lokasi penelitian, serta kebijakan implementasi yang diusung dalam topik penelitian.

1.5. Tujuan

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar rakyat dan toko swalayan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah serta mengetahui penghambat apa saja dalam implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar rakyat dan toko swalayan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.

II. METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengutamakan eksplorasi dan penemuan yang tidak bermaksud untuk menguji teori. Peneliti kualitatif akan mencoba memahami dengan kondisi yang dilihat sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan atau hasil penelitian yang tidak bisa dilakukan dengan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial, dan ekonomi. Hasil penelitian kualitatif berupa pendeskripsian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku masyarakat yang diamati dari suatu kelompok, individu, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam suatu keadaan, kemudian dikaji dari seluruh sudut pandang penelitian, Jaya (2020:6).

Penggunaan pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif bertujuan

agar penelitian ini berfokus menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan secara sistematis, logis dan objektif, sehingga penelitian ini mampu memahami fakta yang sebenarnya terjadi dan memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena pendekatan penelitian kualitatif ini cocok dengan apa yang ingin diteliti dan penulis menggunakan metode deskriptif karena ingin mendeskripsikan bagaimana penataan dan pembinaan pasar rakyat dan toko swalayan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja di Kabupaten Mempawah terkhususnya pada Kecamatan Mempawah Hilir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis telah melaksanakan penelitian di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah dan meneliti di Pasar Rakyat dan Toko Swalayan Kabupaten Mempawah. Penulis mendapatkan beberapa hasil dari penelitian dan wawancara di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah dan pedagang serta konsumen yang ada di Kecamatan Mempawah Hilir, kemudian penulis akan membahasnya. Beberapa informan yang penulis wawancarai adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, Kepala Bidang Perdagangan, Pedagang dan Konsumen di Kecamatan Mempawah Hilir.

3.1 Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2015

Dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2015 dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat dan toko swalayan penulis menggunakan teori dari Edward III Dalam Dyah dan Arif. Terdapat empat faktor dalam implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Dyah dan Arif yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa penghambat dalam pelaksanaan implementasinya seperti masih kurang sumber daya aparatur kondisi pasar rakyat yang memburuk.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya aparatur di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja khususnya di Bidang Perdagangan masih sangat terbatas, sehingga untuk melakukan implementasi kebijakan ini masih belum dapat dilakukan secara maksimal. Tentu saja ini akan menjadi penghambat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

a) Ketersediaan Sumber Daya Aparatur

Ketersediaan jumlah sumber daya aparatur selaku pelaksana kebijakan yang bertugas untuk melayani masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Berdasarkan wawancara penulis kepada Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Mempawah, Bapak Hendri, SP pada tanggal 12 Januari 2023, beliau mengatakan: "Jumlah pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah sebanyak 42 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil. Kurangnya pegawai ini menghambat dalam pengimplementasian suatu kebijakan, sehingga Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah harus memperkuat sumber daya aparatur dengan mengajukan penambahan aparatur di Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah". Berdasarkan keterangan dari informan, penulis menyimpulkan bahwa ketersediaan jumlah sumber daya aparatur sangat dibutuhkan untuk menunjang jalannya suatu kebijakan. Dengan kurangnya sumber daya aparatur pengimplementasian suatu kebijakan akan terhambat atau tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b) Fasilitas

Sarana dan prasarana merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan terkait dengan implementasi kebijakan. Sarana yang mendukung akan membuat tujuan kebijakan akan tercapai. Penulis telah mewawancarai Bapak Hendri, SP selaku Kepala Bidang Perdagangan pada tanggal 12 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: "Hambatan yang terjadi adalah kondisi pasar rakyat yang tidak lebih baik dari toko swalayan. Pasar Rakyat Sebukit Rama di Kecamatan Mempawah Hilir pembangunan atau revitalisasi terakhir terjadi pada tahun 2012 sehingga sudah banyak kios, los dan lapak yang rusak atau tidak memungkinkan untuk digunakan lagi. Hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya minat konsumen untuk berbelanja di pasar rakyat". Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa kondisi pasar rakyat adalah suatu penghambat bagi implementasi kebijakan. Tentu saja konsumen akan lebih memilih untuk berbelanja dengan fasilitas yang nyaman dan tidak mengganggu

3.3 Disposisi

Terciptanya implementasi kebijakan yang efektif harus memiliki disposisi yang kuat. Dibutuhkan pelaksana-pelaksana yang bertekad dan berkomitmen tinggi agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, apabila pelaksana memberikan respon yang negatif atau menolak, maka hal ini dapat menjadi kendala yang serius. Bentuk dari penolakan bisa bermacam-macam. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam disposisi, yakni:

a) Pengangkatan Birokrasi

Dalam perjalanannya, sebuah kebijakan dapat terimplementasi bila ada dukungan dari pelaksana yang berintegritas untuk menjalankannya. Disposisi berkaitan dengan watak, karakter dan skill. Skill adalah kemampuan dalam tindakan untuk memenuhi suatu tugas, orang yang memiliki skill juga sering dinilai sebagai orang yang mampu untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat. Pengangkatan pejabat struktural seperti Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi tentunya harus memiliki pendidikan formal minimal S1 diutamakan S2, mengikuti diklat kedinasan, mempunyai pengalaman kerja di bidang yang sesuai dan mempunyai penilaian kinerja yang baik.

b) Insentif

Insentif sebagai suatu "pemanis" atau booster oleh pelaksana seperti dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu kebijakan agar dapat menambah motivasi pelaksana. Hal seperti ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

3.4 Struktur Birokrasi

Setelah observasi di lapangan penulis melihat bahwa penempatan pejabat struktural

di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja sudah sesuai dengan skill yang dimiliki serta mempunyai pengalaman yang cakap dalam bidang yang telah diberikan. Pelatihan SDM diperlukan untuk memperbaiki prestasi kerja dari SDM dan pengembangan dilakukan untuk mengembangkan keterampilan pejabat struktural untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan posisi atau jabatannya.

3.5 Upaya yang dilakukan

Dalam upaya untuk mengatasi faktor penghambat yang dialami tentu saja koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja bersama Pedagang harus berjalan dengan baik, sehingga tidak ada lagi pedagang yang tidak mengetahui hal-hal penting yang sudah menjadi aturan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2015.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan dan penataan pasar rakyat dan toko swalayan oleh dinas perindustrian, perdagangan dan tenaga kerja di Kabupaten Mempawah merupakan salah satu upaya untuk menghindari hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik di daerah tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat yang dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan yaitu:

- a) Kegiatan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang berdasar hukum pada Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2015 sudah dilaksanakan dengan baik.
- b) Sosialisasi kepada pedagang terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 tahun 2015 telah dilaksanakan dengan maksud pedagang di Kecamatan Mempawah Hilir mengetahui dan memahami maksud serta tujuan dari peraturan tersebut.
- c) Proses penataan dan pembinaan pasar rakyat dan toko swalayan terdapat kekurangan pada sumber daya sehingga proses pengimplementasian di lapangan terhambat.
- d) Fasilitas yang masih kurang karena kondisi pasar rakyat yang semakin memburuk sehingga banyak kios, lapak dan lok yang sudah tidak bisa digunakan.
- e) Pengangkatan birokrasi sudah sesuai dengan skill dan pengalaman yang dimiliki sesuai bidangnya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih kurangnya temuan penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian

berkelanjutan di Kabupaten Mempawah terkait penataan dan pembinaan pasar rakyat dan toko swalayan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materil sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan tersebut penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam proses penyusunan Skripsi, serta kedua orang tua penulis alm bapak Firmanto dan ibu Salbiani yang telah mendukung dengan sangat luar biasa dan yang senantiasa mendoakan untuk keberhasilan penulis. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih terhadap pihak pihak terkait khususnya yang telah membantu penulis selama proses penulisan serta penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*.
- Darlington, Yvonne, Scoot, Dorothy. (2002). *Qualitative Research in Practice: Stories from the Field*. McGraw-Hill Education.
- Gulo, W. (2000). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo Anggota IKAPI.
- Hardani. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi, N, K, D, S, L., Mahendrawati, N, L, M., Arini, D, G, D. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (1). 22-26.
- Dewi, A, S, P. (2020). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Tawang Sari. *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 1*.
- Gigih, Y. R. (2018). Penataan Toko Modern Dan Pasar Tradisional Dalam Rangka Mewujudkan Keseimbangan Pertumbuhan Pasar Di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014. Skripsi.
- Haryana, Teza. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Studi Tentang Penataan Pasar Rakyat Purwadadi). Skripsi.
- Tantyhana, W. M. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2

Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Kasus Pasar Cikutra). Skripsi.

